



**BUPATI KUNINGAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan  
Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2015, perlu ditetapkan Tata Cara Penetapan,  
Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas,  
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara  
Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana  
Desa Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam  
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang  
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten  
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14  
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah  
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor  
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun  
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor  
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1448 Tahun 2018);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 Tahun 2018);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 9 Seri E);
21. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 20);
22. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 11).

24. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 58).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
20. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh perangkat Desa.
21. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
22. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
23. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
25. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
33. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
34. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
36. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

ADD yang diberikan dengan maksud untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan pada kewenangannya merupakan kewenangan desa.

### Pasal 3

Tujuan ADD adalah sebagai berikut :

- a. sebagai sumber penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. sebagai sumber Operasional Pemerintah Desa;
- c. sebagai sumber Tunjangan dan Operasional BPD;
- d. sebagai sumber Operasional RT/ RW;
- e. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- f. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- g. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
- i. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

## BAB III PENETAPAN ADD

### Pasal 4

- (1) ADD ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

### Pasal 5

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan kepada seluruh desa di Kabupaten Kuningan.
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut asas pemerataan dan keadilan.

### Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi asas pemerataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari total ADD dibagi secara merata kepada seluruh desa di Kabupaten Kuningan.

- (2) Untuk memenuhi asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari total ADD dibagikan kepada desa secara proporsional sesuai nilai bobot desa yang didasarkan pada variabel luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, keterjangkauan dan jumlah perangkat desa.

#### Pasal 7

- (1) Rumus ADD adalah sebagai berikut :

$$ADD_i = ADM_i + ADV_i$$

Keterangan :

$ADD_i$  = ADD untuk Desa i;

$ADM_i$  = Alokasi Dana Minimum untuk Desa i (80% x ADD);

$ADV_i$  = Alokasi Dana Variabel untuk Desa i ( $BD_i \times (ADD - \sum ADM)$ ) :  $\sum \text{Desa se - Kabupaten Kuningan}$ ;

$BD_i$  = Nilai Bobot Desa untuk Desa i;

ADD = Total ADD se-Kabupaten Kuningan;

$\sum ADM$  = Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimum.

- (2) Nilai Bobot Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel menggunakan rumus :

$$BD_i = a_1 KVLW + a_2 KVJP + a_3 KVJPM + a_4 KVKJ + a_5 KVJPD$$

**Keterangan :**

$BD_i$  = Nilai Bobot Desa untuk Desa i

$a_1 - a_5$  = Nilai Bobot masing-masing Variabel

KVLW = Koefisien Variabel Luas Wilayah

KVJP = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk

KVJPM = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk Miskin

KVKJ = Koefisien Variabel Keterjangkauan

KVJPD = Koefisien Variabel Jumlah Perangkat Desa

- (3) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut :

a. Variabel Jumlah Penduduk ( $a_1$ ) = 0,30

b. Variabel Luas Wilayah ( $a_2$ ) = 0,20

c. Variabel Jumlah Penduduk Miskin ( $a_3$ ) = 0,20

d. Variabel Keterjangkauan ( $a_4$ ) = 0,20

e. Variabel Jumlah Perangkat Desa ( $a_5$ ) = 0,10



- (4) Variabel Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari data laporan desa dan atau kecamatan
- (5) Variabel Luas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersumber dari data laporan desa dan atau kecamatan.
- (6) Variabel Jumlah Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersumber dari data terakhir Badan Pusat Statistik.
- (7) Variabel Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bersumber dari data laporan desa dan atau kecamatan.
- (8) Variabel jumlah perangkat desa dimaksud pada ayat (3) huruf e bersumber dari data laporan desa dan atau kecamatan.
- (9) Koefisien Variabel merupakan perbandingan antara Variabel Desa yang bersangkutan dengan jumlah total Variabel Desa se-Kabupaten dengan rumus:

$$KV i = \frac{Vi}{\sum Vi Kab}$$

Keterangan :

KV i = Koefisien Variabel Desa i

Vi = Variabel Desa i

$\sum ViKab$  = Jumlah Total Variabel se - Kabupaten Kuningan

- (10) Besaran ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### MEKANISME PENCAIRAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Pencairan

#### Pasal 8

ADD disalurkan 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran tiap semester, melalui pemindahbukuan dari BUD ke Nomor rekening masing-masing desa, dengan ketentuan :

- a. Tahap 1 dicairkan pada semester I sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dari total ADD;

- b. Tahap 2 dicairkan pada semester II sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari total ADD.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Camat dengan dilampiri :
  - a. RPJM Desa;
  - b. RKP Desa tahun berjalan;
  - c. Perdes tentang APB Desa tahun berjalan;
  - d. Perkades tentang Penjabaran APB Desa tahun berjalan;
  - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun berjalan;
  - f. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
  - g. fotokopi nomor rekening Kas Desa di bank Jabar Banten dan Bank Perkreditan Rakyat atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Permohonan pencairan ADD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Kecamatan dan diterbitkan rekomendasi Camat tentang Hasil Verifikasi untuk mendapatkan ADD.
- (3) Camat mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati C.q Kepala DPMD dengan dilampiri :
  - a. Rekomendasi tentang hasil verifikasi permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Desa;
  - b. RPJM Desa;
  - c. RKP Desa tahun berjalan;
  - d. Perdes tentang APB Desa tahun berjalan;
  - e. Perkades tentang Penjabaran APB Desa tahun berjalan;
  - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun berjalan;
  - g. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
  - h. fotokopi nomor rekening Kas Desa di bank Jabar Banten dan Bank Perkreditan Rakyat atas nama Pemerintah Desa.
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) DPMD menginventarisir serta merekap permohonan pencairan ADD dan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran.
- (6) Atas permohonan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

- (7) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuningan.
- (8) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuningan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (9) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuningan memerintahkan Bank Persepsi dalam hal ini Bank Jabar Banten Cabang Kuningan mentransfer ke Rekening Desa.

Bagian Kedua  
Penggunaan  
Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD terintegrasi dalam APB Desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh per seratus)
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Pasal 11

Penggunaan ADD sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh per seratus) untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Pertanggungjawaban dan Pelaporan  
Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Disamping pertanggungjawaban ADD yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa, desa juga diharuskan untuk membuat laporan realisasi penggunaan ADD per tahapan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I paling lambat tanggal 31 bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap II paling lambat tanggal 31 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran II peraturan ini, disampaikan Kepada Bupati cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan melalui Camat;

- (4) Camat menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai rekapitulasi penggunaan ADD menggunakan format sebagaimana lampiran III Peraturan ini.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 13

- (1) Untuk pembinaan pengelolaan ADD dibentuk Tim Pembina dan Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi ADD;
  - b. menyusun pedoman pelaksanaan ADD;
  - c. menyampaikan usulan besaran ADD yang diterima masing-masing desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan; dan
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (3) Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
  - b. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan dengan Tim Pendamping Kecamatan;
  - c. memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan ADD;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pendamping Kecamatan;
  - e. menerima dan mengevaluasi laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD dari Tingkat Desa dan Kecamatan;
  - f. melaporkan kegiatan ADD kepada Bupati.

Pasal 14

Pembinaan pengelolaan ADD pada Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, sebagai bagian dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan membentuk Tim Pendamping Kecamatan yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan verifikasi bidang administrasi dan fisik pelaksanaan ADD;
- b. melaksanakan asistensi dan pembinaan pengelolaan ADD;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
- d. memfasilitasi pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;

- e. menerima dan mengevaluasi laporan dari Desa tentang pelaksanaan ADD; dan
- f. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan ADD kepada Bupati cq. Kepala BPMD, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di Desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PPKD dan tim pelaksana kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

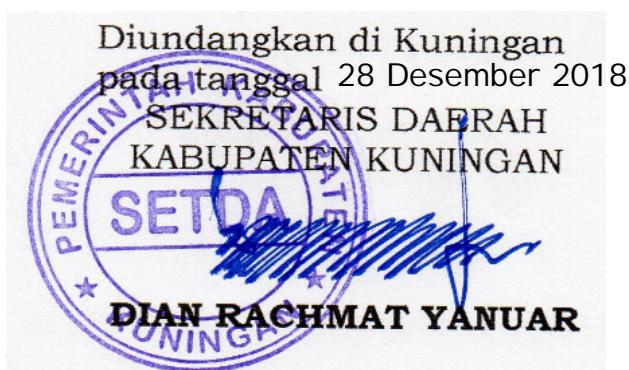
Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal : 28 Desember 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 NOMOR 61

Lampiran I PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
 NOMOR : 61 Tahun 2018  
 TANGGAL : 28 Desember 2018  
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN,  
 PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA  
 DESA TAHUN ANGGARAN 2019

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)			
			ADDM	ADDV	TOTAL ADD	PEMBULATAN
1	KADUGEDE	SINDANGJAWA	289.880.221	57.391.468	347.271.690	347.271.700
2	KADUGEDE	CIKETAK	289.880.221	42.395.557	332.275.779	332.275.800
3	KADUGEDE	NANGKA	289.880.221	39.679.720	329.559.942	329.559.900
4	KADUGEDE	WINDUJANTEN	289.880.221	49.670.556	339.550.777	339.550.800
5	KADUGEDE	KADUGEDE	289.880.221	78.257.835	368.138.056	368.138.100
6	KADUGEDE	BABATAN	289.880.221	38.922.792	328.803.013	328.803.000
7	KADUGEDE	CIPONDOK	289.880.221	40.338.391	330.218.613	330.218.600
8	KADUGEDE	BAYUNING	289.880.221	61.972.047	351.852.269	351.852.300
9	KADUGEDE	TINGGAR	289.880.221	42.097.560	331.977.781	331.977.800
10	KADUGEDE	CIHERANG	289.880.221	71.403.754	361.283.975	361.284.000
11	KADUGEDE	CISUKADANA	289.880.221	43.566.471	333.446.693	333.446.700
12	KADUGEDE	MARGABAKTI	289.880.221	47.632.407	337.512.628	337.512.600
13	CINIRU	PINARA	289.880.221	95.571.544	385.451.765	385.451.800
14	CINIRU	CIJEMIT	289.880.221	71.918.624	361.798.846	361.798.800
15	CINIRU	CIPEDES	289.880.221	134.086.824	423.967.046	423.967.000
16	CINIRU	CINIRU	289.880.221	55.416.305	345.296.527	345.296.500
17	CINIRU	RAMBATAN	289.880.221	116.151.560	406.031.782	406.031.800
18	CINIRU	LONGKEWANG	289.880.221	50.705.493	340.585.714	340.585.700
19	CINIRU	MUNGKALDATAR	289.880.221	45.603.548	335.483.769	335.483.800
20	CINIRU	GUNUNGMANIK	289.880.221	97.426.462	387.306.684	387.306.700
21	CINIRU	PAMUPOKAN	289.880.221	60.512.929	350.393.150	350.393.200
22	SUBANG	TANGKOLO	289.880.221	78.389.924	368.270.145	368.270.100
23	SUBANG	PAMULIHAN	289.880.221	125.934.477	415.814.699	415.814.700
24	SUBANG	SUBANG	289.880.221	170.393.925	460.274.147	460.274.100
25	SUBANG	GUNUNGACI	289.880.221	91.355.256	381.235.478	381.235.500
26	SUBANG	SITUGEDE	289.880.221	81.868.970	371.749.192	371.749.200
27	SUBANG	BANGUNJAYA	289.880.221	72.882.860	362.763.081	362.763.100
28	SUBANG	JATISARI	289.880.221	102.358.796	392.239.017	392.239.000

29	CIWARU	SUMBERJAYA	289.880.221	86.243.761	376.123.983	376.124.000
30	CIWARU	CILAYUNG	289.880.221	65.752.183	355.632.405	355.632.400
31	CIWARU	CIWARU	289.880.221	137.881.767	427.761.989	427.762.000
32	CIWARU	GARAJATI	289.880.221	88.874.459	378.754.681	378.754.700
33	CIWARU	BAOK	289.880.221	106.676.575	396.556.796	396.556.800
34	CIWARU	ANDAMUI	289.880.221	87.870.419	377.750.640	377.750.600
35	CIWARU	SAGARANTEN	289.880.221	65.318.514	355.198.736	355.198.700
36	CIWARU	CITUNDUN	289.880.221	86.378.753	376.258.975	376.259.000
37	CIWARU	LEBAKHERANG	289.880.221	54.455.866	344.336.087	344.336.100
38	CIWARU	KARANGBARU	289.880.221	67.478.427	357.358.649	357.358.600
39	CIWARU	LINGGA JAYA	289.880.221	69.086.556	358.966.778	358.966.800
40	CIWARU	CITIKUR	289.880.221	61.550.537	351.430.759	351.430.800
41	CIBINGBIN	CIPONDOK	289.880.221	107.797.440	397.677.661	397.677.700
42	CIBINGBIN	SINDANGJAWA	289.880.221	78.822.218	368.702.439	368.702.400
43	CIBINGBIN	CIANGIR	289.880.221	113.048.180	402.928.402	402.928.400
44	CIBINGBIN	CIBINGBIN	289.880.221	185.367.382	475.247.604	475.247.600
45	CIBINGBIN	CITENJO	289.880.221	91.578.274	381.458.495	381.458.500
46	CIBINGBIN	DUKUHBADAG	289.880.221	111.195.404	401.075.625	401.075.600
47	CIBINGBIN	BANTARPANJANG	289.880.221	151.763.732	441.643.954	441.644.000
48	CIBINGBIN	SUKAMAJU	289.880.221	89.515.640	379.395.861	379.395.900
49	CIBINGBIN	SUKAHARJA	289.880.221	85.828.619	375.708.841	375.708.800
50	CIBINGBIN	CISAAT	289.880.221	63.319.717	353.199.938	353.199.900
51	LURAGUNG	DUKUHPICUNG	289.880.221	77.895.907	367.776.128	367.776.100
52	LURAGUNG	WALAHARCAGEUR	289.880.221	64.884.087	354.764.308	354.764.300
53	LURAGUNG	WILANAGARA	289.880.221	95.998.371	385.878.593	385.878.600
54	LURAGUNG	CIGEDANG	289.880.221	59.322.871	349.203.093	349.203.100
55	LURAGUNG	LURAGUNGTONGGOH	289.880.221	55.909.705	345.789.926	345.789.900
56	LURAGUNG	SINDANGSARI	289.880.221	58.428.786	348.309.007	348.309.000
57	LURAGUNG	CIRAHAYU	289.880.221	70.341.546	360.221.767	360.221.800
58	LURAGUNG	MARGASARI	289.880.221	46.401.094	336.281.316	336.281.300
59	LURAGUNG	SINDANGSUKA	289.880.221	51.531.841	341.412.063	341.412.100
60	LURAGUNG	CIKANDANG	289.880.221	85.094.114	374.974.336	374.974.300
61	LURAGUNG	PANYOSOGAN	289.880.221	89.039.334	378.919.555	378.919.600
62	LURAGUNG	GUNUNGKARUNG	289.880.221	76.693.674	366.573.895	366.573.900
63	LURAGUNG	LURAGUNGLANDEUH	289.880.221	89.396.623	379.276.845	379.276.800

64	LURAGUNG	DUKUHMAJA	289.880.221	71.666.682	361.546.904	361.546.900
65	LURAGUNG	BENDA	289.880.221	90.204.867	380.085.088	380.085.100
66	LURAGUNG	CIKADUWETAN	289.880.221	98.432.603	388.312.824	388.312.800
67	LEBAKWANGI	LANGSEB	289.880.221	55.253.171	345.133.393	345.133.400
68	LEBAKWANGI	CINAGARA	289.880.221	78.011.898	367.892.120	367.892.100
69	LEBAKWANGI	CINEUMBEUY	289.880.221	64.316.114	354.196.336	354.196.300
70	LEBAKWANGI	CIPETIR	289.880.221	61.240.675	351.120.896	351.120.900
71	LEBAKWANGI	LEBAKWANGI	289.880.221	76.451.939	366.332.160	366.332.200
72	LEBAKWANGI	MANCAGAR	289.880.221	44.769.407	334.649.628	334.649.600
73	LEBAKWANGI	BENDUNGAN	289.880.221	64.976.944	354.857.166	354.857.200
74	LEBAKWANGI	SINDANG	289.880.221	73.608.123	363.488.344	363.488.300
75	LEBAKWANGI	PASAYANGAN	289.880.221	46.227.999	336.108.221	336.108.200
76	LEBAKWANGI	PAJAWANKIDUL	289.880.221	60.800.764	350.680.986	350.681.000
77	LEBAKWANGI	PAGUNDAN	289.880.221	87.524.443	377.404.665	377.404.700
78	LEBAKWANGI	MEKARWANGI	289.880.221	101.001.074	390.881.295	390.881.300
79	LEBAKWANGI	MANGGARI	289.880.221	56.879.875	346.760.096	346.760.100
80	GARAWANGI	GEWOK	289.880.221	84.220.129	374.100.350	374.100.400
81	GARAWANGI	CIRUKEM	289.880.221	81.386.678	371.266.900	371.266.900
82	GARAWANGI	PAKEMBANGAN	289.880.221	60.353.907	350.234.129	350.234.100
83	GARAWANGI	SUKAIMUT	289.880.221	38.981.212	328.861.433	328.861.400
84	GARAWANGI	CIKANANGA	289.880.221	44.812.118	334.692.339	334.692.300
85	GARAWANGI	TAMBAKBAYA	289.880.221	42.950.532	332.830.754	332.830.800
86	GARAWANGI	GARAWANGI	289.880.221	65.745.784	355.626.006	355.626.000
87	GARAWANGI	SUKAMULYA	289.880.221	45.913.229	335.793.450	335.793.500
88	GARAWANGI	MANCAGAR	289.880.221	41.983.917	331.864.139	331.864.100
89	GARAWANGI	PURWASARI	289.880.221	92.786.812	382.667.034	382.667.000
90	GARAWANGI	LENGKONG	289.880.221	114.041.973	403.922.194	403.922.200
91	GARAWANGI	KARAMATWANGI	289.880.221	42.533.061	332.413.283	332.413.300
92	GARAWANGI	CITIUSARI	289.880.221	43.208.233	333.088.455	333.088.500
93	GARAWANGI	MEKARMULYA	289.880.221	43.559.972	333.440.193	333.440.200
94	GARAWANGI	TEMBONG	289.880.221	40.559.651	330.439.873	330.439.900
95	GARAWANGI	KUTAKEMBARAN	289.880.221	58.760.052	348.640.274	348.640.300
96	GARAWANGI	KADATUAN	289.880.221	61.883.179	351.763.400	351.763.400
97	KUNINGAN	CIBINUANG	289.880.221	65.295.178	355.175.400	355.175.400
98	KUNINGAN	KARANGTAWANG	289.880.221	72.736.428	362.616.649	362.616.600



99	KUNINGAN	KEDUNGARUM	289.880.221	48.001.897	337.882.118	337.882.100
100	KUNINGAN	ANCARAN	289.880.221	95.396.257	385.276.479	385.276.500
101	KUNINGAN	KASTURI	289.880.221	61.657.095	351.537.316	351.537.300
102	KUNINGAN	PADAREK	289.880.221	54.899.842	344.780.064	344.780.100
103	CIAWIGEBANG	GERESIK	289.880.221	101.022.272	390.902.494	390.902.500
104	CIAWIGEBANG	KADURAMA	289.880.221	58.254.527	348.134.748	348.134.700
105	CIAWIGEBANG	CIAWIGEBANG	289.880.221	93.478.557	383.358.779	383.358.800
106	CIAWIGEBANG	LEBAKSIUH	289.880.221	57.335.305	347.215.526	347.215.500
107	CIAWIGEBANG	CIPUTAT	289.880.221	85.804.853	375.685.074	375.685.100
108	CIAWIGEBANG	PAJAWANLOR	289.880.221	46.339.578	336.219.799	336.219.800
109	CIAWIGEBANG	SIDARAJA	289.880.221	100.054.542	389.934.764	389.934.800
110	CIAWIGEBANG	KAPANDAYAN	289.880.221	65.420.946	355.301.168	355.301.200
111	CIAWIGEBANG	PANGKALAN	289.880.221	75.866.098	365.746.320	365.746.300
112	CIAWIGEBANG	CIOMAS	289.880.221	59.534.737	349.414.958	349.415.000
113	CIAWIGEBANG	SUKARAJA	289.880.221	130.163.815	420.044.036	420.044.000
114	CIAWIGEBANG	CIHAUR	289.880.221	97.375.250	387.255.472	387.255.500
115	CIAWIGEBANG	CIAWILOR	289.880.221	115.155.554	405.035.775	405.035.800
116	CIAWIGEBANG	CIGARUKGAK	289.880.221	93.082.870	382.963.092	382.963.100
117	CIAWIGEBANG	SUKADANA	289.880.221	101.939.243	391.819.465	391.819.500
118	CIAWIGEBANG	CIHIRUP	289.880.221	115.391.435	405.271.657	405.271.700
119	CIAWIGEBANG	KERAMATMULYA	289.880.221	78.622.764	368.502.986	368.503.000
120	CIAWIGEBANG	PAMIJAHAN	289.880.221	60.131.562	350.011.784	350.011.800
121	CIAWIGEBANG	KARANGKAMULYAN	289.880.221	54.944.263	344.824.485	344.824.500
122	CIAWIGEBANG	PADARAMA	289.880.221	71.674.174	361.554.395	361.554.400
123	CIAWIGEBANG	CIKUBANGMULYA	289.880.221	78.056.773	367.936.995	367.937.000
124	CIAWIGEBANG	DUKUHDALEM	289.880.221	47.507.252	337.387.473	337.387.500
125	CIAWIGEBANG	MEKARJAYA	289.880.221	95.990.768	385.870.990	385.871.000
126	CIAWIGEBANG	CIJAGAMULYA	289.880.221	43.191.282	333.071.503	333.071.500
127	CIDAHU	CIHIDEUNGGIRANG	289.880.221	86.014.944	375.895.166	375.895.200
128	CIDAHU	CIHIDEUNGHILIR	289.880.221	128.637.144	418.517.365	418.517.400
129	CIDAHU	CIDAHU	289.880.221	80.099.588	369.979.809	369.979.800
130	CIDAHU	KERTAWINANGUN	289.880.221	63.145.771	353.025.992	353.026.000
131	CIDAHU	DATAR	289.880.221	94.998.301	384.878.522	384.878.500
132	CIDAHU	LEGOK	289.880.221	87.486.603	377.366.825	377.366.800
133	CIDAHU	CIKEUSIK	289.880.221	71.408.772	361.288.993	361.289.000

134	CIDAHU	CIEURIH	289.880.221	102.756.246	392.636.468	392.636.500
135	CIDAHU	CIBULAN	289.880.221	84.532.072	374.412.294	374.412.300
136	CIDAHU	NANGGELA	289.880.221	80.028.265	369.908.487	369.908.500
137	CIDAHU	JATIMULYA	289.880.221	107.839.737	397.719.958	397.720.000
138	CIDAHU	BUNDER	289.880.221	55.314.652	345.194.874	345.194.900
139	JALAKSANA	SUKAMUKTI	289.880.221	81.092.486	370.972.707	370.972.700
140	JALAKSANA	SIDAMULYA	289.880.221	51.321.666	341.201.888	341.201.900
141	JALAKSANA	JALAKSANA	289.880.221	80.162.632	370.042.854	370.042.900
142	JALAKSANA	SANGKANERANG	289.880.221	51.223.059	341.103.281	341.103.300
143	JALAKSANA	SAYANA	289.880.221	47.258.801	337.139.023	337.139.000
144	JALAKSANA	PEUSING	289.880.221	52.808.866	342.689.087	342.689.100
145	JALAKSANA	SEMBAWA	289.880.221	57.758.098	347.638.319	347.638.300
146	JALAKSANA	SADAMANTRA	289.880.221	46.672.269	336.552.490	336.552.500
147	JALAKSANA	MANISKIDUL	289.880.221	80.553.310	370.433.532	370.433.500
148	JALAKSANA	MANISLOR	289.880.221	71.774.758	361.654.979	361.655.000
149	JALAKSANA	CINIRU	289.880.221	38.962.199	328.842.421	328.842.400
150	JALAKSANA	PADAMENAK	289.880.221	38.684.268	328.564.490	328.564.500
151	JALAKSANA	BABAKANMULYA	289.880.221	68.976.660	358.856.881	358.856.900
152	JALAKSANA	SINDANGBARANG	289.880.221	75.487.968	365.368.190	365.368.200
153	JALAKSANA	NANGGERANG	289.880.221	40.889.845	330.770.067	330.770.100
154	CILIMUS	BANDORASA WETAN	289.880.221	61.444.221	351.324.442	351.324.400
155	CILIMUS	BANDORASA KULON	289.880.221	86.001.759	375.881.980	375.882.000
156	CILIMUS	LINGGASANA	289.880.221	45.142.340	335.022.561	335.022.600
157	CILIMUS	LINGGAJATI	289.880.221	64.975.820	354.856.042	354.856.000
158	CILIMUS	BOJONG	289.880.221	73.978.950	363.859.172	363.859.200
159	CILIMUS	CILIMUS	289.880.221	102.823.868	392.704.090	392.704.100
160	CILIMUS	SETIANEGARA	289.880.221	71.288.047	361.168.269	361.168.300
161	CILIMUS	CIBEUREUM	289.880.221	55.509.657	345.389.878	345.389.900
162	CILIMUS	KALIAREN	289.880.221	59.578.233	349.458.454	349.458.500
163	CILIMUS	SAMPORA	289.880.221	81.229.922	371.110.143	371.110.100
164	CILIMUS	CARACAS	289.880.221	83.232.474	373.112.695	373.112.700
165	CILIMUS	LINGGAMEKAR	289.880.221	51.990.143	341.870.364	341.870.400
166	CILIMUS	LINGGAINDAH	289.880.221	37.393.795	327.274.016	327.274.000
167	MANDIRANDAN	CIREA	289.880.221	57.819.504	347.699.726	347.699.700
168	MANDIRANDAN	SUKASARI	289.880.221	58.379.438	348.259.659	348.259.700

169	MANDIRANDAN	SEDA	289.880.221	70.536.077	360.416.298	360.416.300
170	MANDIRANDAN	TRIJAYA	289.880.221	53.208.763	343.088.984	343.089.000
171	MANDIRANDAN	RANDOBAWAGIRANG	289.880.221	56.326.382	346.206.604	346.206.600
172	MANDIRANDAN	PAKEMBANGAN	289.880.221	54.858.855	344.739.077	344.739.100
173	MANDIRANDAN	RANDOBAWAILIR	289.880.221	85.908.096	375.788.318	375.788.300
174	MANDIRANDAN	KERTAWINANGUN	289.880.221	65.404.890	355.285.112	355.285.100
175	MANDIRANDAN	MANDIRANCAN	289.880.221	69.855.890	359.736.111	359.736.100
176	MANDIRANDAN	NANGGELA	289.880.221	71.238.767	361.118.988	361.119.000
177	MANDIRANDAN	NANGGERANGJAYA	289.880.221	43.351.337	333.231.558	333.231.600
178	MANDIRANDAN	SALAKADOMAS	289.880.221	38.175.286	328.055.508	328.055.500
179	SELAJAMBE	SELAJAMBE	289.880.221	92.630.611	382.510.832	382.510.800
180	SELAJAMBE	CANTILAN	289.880.221	87.046.111	376.926.332	376.926.300
181	SELAJAMBE	CIBERUNG	289.880.221	87.595.394	377.475.616	377.475.600
182	SELAJAMBE	KUTAWARINGIN	289.880.221	111.173.361	401.053.582	401.053.600
183	SELAJAMBE	JAMBERAMA	289.880.221	88.355.393	378.235.615	378.235.600
184	SELAJAMBE	BAGAWAT	289.880.221	74.207.264	364.087.486	364.087.500
185	SELAJAMBE	PADAHURIP	289.880.221	78.681.550	368.561.772	368.561.800
186	KRAMATMULYA	GEREBA	289.880.221	45.276.446	335.156.667	335.156.700
187	KRAMATMULYA	CILAJA	289.880.221	56.837.330	346.717.552	346.717.600
188	KRAMATMULYA	CIKUBANGSARI	289.880.221	58.090.711	347.970.932	347.970.900
189	KRAMATMULYA	BOJONG	289.880.221	63.212.702	353.092.924	353.092.900
190	KRAMATMULYA	CILOWA	289.880.221	62.835.202	352.715.424	352.715.400
191	KRAMATMULYA	CIBENTANG	289.880.221	40.874.033	330.754.255	330.754.300
192	KRAMATMULYA	RAGAWACANA	289.880.221	56.484.716	346.364.937	346.364.900
193	KRAMATMULYA	PAJAMBON	289.880.221	57.567.543	347.447.764	347.447.800
194	KRAMATMULYA	GANDASOLI	289.880.221	60.404.522	350.284.744	350.284.700
195	KRAMATMULYA	KALAPAGUNUNG	289.880.221	58.958.704	348.838.925	348.838.900
196	KRAMATMULYA	KRAMATMULYA	289.880.221	59.118.789	348.999.011	348.999.000
197	KRAMATMULYA	CIKASO	289.880.221	77.626.072	367.506.294	367.506.300
198	KRAMATMULYA	KARANGMANGU	289.880.221	79.800.469	369.680.691	369.680.700
199	KRAMATMULYA	WIDARASARI	289.880.221	50.000.628	339.880.849	339.880.800
200	DARMA	CIMENGA	289.880.221	100.284.175	390.164.397	390.164.400
201	DARMA	CAGEUR	289.880.221	59.284.282	349.164.503	349.164.500
202	DARMA	SAKERTA BARAT	289.880.221	72.955.109	362.835.331	362.835.300
203	DARMA	SUKARASA	289.880.221	77.076.245	366.956.467	366.956.500

204	DARMA	PANINGGARAN	289.880.221	48.327.988	338.208.210	338.208.200
205	DARMA	CIPASUNG	289.880.221	68.200.648	358.080.870	358.080.900
206	DARMA	KAWAHMANUK	289.880.221	47.043.430	336.923.651	336.923.700
207	DARMA	CIKUPA	289.880.221	52.643.905	342.524.126	342.524.100
208	DARMA	PARUNG	289.880.221	66.395.888	356.276.110	356.276.100
209	DARMA	DARMA	289.880.221	112.651.591	402.531.813	402.531.800
210	DARMA	JAGARA	289.880.221	51.507.836	341.388.058	341.388.100
211	DARMA	BAKOM	289.880.221	77.106.677	366.986.898	366.986.900
212	DARMA	KARANGANYAR	289.880.221	59.559.029	349.439.251	349.439.300
213	DARMA	KARANGSARI	289.880.221	60.222.276	350.102.498	350.102.500
214	DARMA	SAGARAHANG	289.880.221	130.060.631	419.940.852	419.940.900
215	DARMA	GUNUNGSIRAH	289.880.221	96.719.848	386.600.069	386.600.100
216	DARMA	SAKERTA TIMUR	289.880.221	68.170.856	358.051.077	358.051.100
217	DARMA	TUGUMULYA	289.880.221	75.866.386	365.746.607	365.746.600
218	DARMA	SITUSARI	289.880.221	50.913.691	340.793.912	340.793.900
219	CIGUGUR	CILEULEUY	289.880.221	63.403.082	353.283.304	353.283.300
220	CIGUGUR	PUNCAK	289.880.221	82.718.812	372.599.033	372.599.000
221	CIGUGUR	GUNUNGKELING	289.880.221	47.672.992	337.553.213	337.553.200
222	CIGUGUR	CISANTANA	289.880.221	110.074.693	399.954.914	399.954.900
223	CIGUGUR	BABAKANMULYA	289.880.221	79.903.534	369.783.756	369.783.800
224	PASAWAHAN	PADABEUNGHAR	289.880.221	86.055.124	375.935.346	375.935.300
225	PASAWAHAN	KADUELA	289.880.221	75.836.122	365.716.344	365.716.300
226	PASAWAHAN	PASAWAHAN	289.880.221	95.969.458	385.849.679	385.849.700
227	PASAWAHAN	CIWIRU	289.880.221	60.832.539	350.712.760	350.712.800
228	PASAWAHAN	CIDAHU	289.880.221	54.503.767	344.383.989	344.384.000
229	PASAWAHAN	CIMARA	289.880.221	55.838.086	345.718.308	345.718.300
230	PASAWAHAN	PANIIS	289.880.221	94.340.910	384.221.131	384.221.100
231	PASAWAHAN	CIBUNTU	289.880.221	49.360.612	339.240.834	339.240.800
232	PASAWAHAN	SINGKUP	289.880.221	42.598.507	332.478.728	332.478.700
233	PASAWAHAN	PADAMATANG	289.880.221	49.041.342	338.921.564	338.921.600
234	NUSAHERANG	HAURKUNING	289.880.221	101.550.646	391.430.868	391.430.900
235	NUSAHERANG	KERTAYUGA	289.880.221	50.737.824	340.618.046	340.618.000
236	NUSAHERANG	WINDUSARI	289.880.221	40.516.130	330.396.352	330.396.400
237	NUSAHERANG	NUSAHERANG	289.880.221	53.265.551	343.145.772	343.145.800
238	NUSAHERANG	JAMBAR	289.880.221	88.825.692	378.705.914	378.705.900

239	NUSAHERANG	CIKADU	289.880.221	67.995.108	357.875.329	357.875.300
240	NUSAHERANG	KERTAWIRAMA	289.880.221	55.281.339	345.161.561	345.161.600
241	NUSAHERANG	CIASIH	289.880.221	38.245.170	328.125.391	328.125.400
242	CIPICUNG	MUNCANGELA	289.880.221	70.872.649	360.752.870	360.752.900
243	CIPICUNG	KAROYA	289.880.221	58.152.718	348.032.939	348.032.900
244	CIPICUNG	SUSUKAN	289.880.221	88.993.065	378.873.287	378.873.300
245	CIPICUNG	CIMARANTEN	289.880.221	57.200.500	347.080.721	347.080.700
246	CIPICUNG	CIPICUNG	289.880.221	53.189.906	343.070.127	343.070.100
247	CIPICUNG	PAMULIHAN	289.880.221	76.641.344	366.521.566	366.521.600
248	CIPICUNG	SALAREUMA	289.880.221	55.921.185	345.801.406	345.801.400
249	CIPICUNG	SUGANANGAN	289.880.221	72.445.093	362.325.314	362.325.300
250	CIPICUNG	SUKAMUKTI	289.880.221	57.712.256	347.592.477	347.592.500
251	CIPICUNG	MEKARSARI	289.880.221	40.750.273	330.630.495	330.630.500
252	PANCALANG	SILEBU	289.880.221	78.355.777	368.235.998	368.236.000
253	PANCALANG	PATALAGAN	289.880.221	66.443.244	356.323.465	356.323.500
254	PANCALANG	KAHIYANGAN	289.880.221	47.897.633	337.777.854	337.777.900
255	PANCALANG	TAJURBUNTU	289.880.221	50.959.213	340.839.434	340.839.400
256	PANCALANG	PANCALANG	289.880.221	65.212.783	355.093.004	355.093.000
257	PANCALANG	SUMBAKELING	289.880.221	48.281.520	338.161.742	338.161.700
258	PANCALANG	SAREWU	289.880.221	55.130.954	345.011.176	345.011.200
259	PANCALANG	SINDANGKEMPENG	289.880.221	51.491.080	341.371.302	341.371.300
260	PANCALANG	RAJAWETAN	289.880.221	51.657.901	341.538.122	341.538.100
261	PANCALANG	TENJOLAYAR	289.880.221	71.026.179	360.906.400	360.906.400
262	PANCALANG	MEKARJAYA	289.880.221	49.720.207	339.600.429	339.600.400
263	PANCALANG	TARIKOLOT	289.880.221	50.231.182	340.111.404	340.111.400
264	PANCALANG	DANALAMPAH	289.880.221	45.134.494	335.014.715	335.014.700
265	JAPARA	GARATENGAH	289.880.221	42.445.140	332.325.361	332.325.400
266	JAPARA	RAJADANU	289.880.221	65.509.117	355.389.338	355.389.300
267	JAPARA	SINGKUP	289.880.221	42.977.606	332.857.827	332.857.800
268	JAPARA	JAPARA	289.880.221	60.126.404	350.006.626	350.006.600
269	JAPARA	WANO	289.880.221	39.571.848	329.452.070	329.452.100
270	JAPARA	CITAPEN	289.880.221	48.038.464	337.918.686	337.918.700
271	JAPARA	CENGAL	289.880.221	102.387.748	392.267.970	392.268.000
272	JAPARA	CIKELENG	289.880.221	88.335.972	378.216.194	378.216.200
273	JAPARA	KALIMATI	289.880.221	72.136.418	362.016.639	362.016.600
274	JAPARA	DUKUHDALEM	289.880.221	55.748.800	345.629.021	345.629.000

275	CIMAHI	CILEUYA	289.880.221	128.669.311	418.549.533	418.549.500
276	CIMAHI	MARGAMUKTI	289.880.221	121.085.478	410.965.699	410.965.700
277	CIMAHI	GUNUNGSARI	289.880.221	122.347.145	412.227.367	412.227.400
278	CIMAHI	CIMAHI	289.880.221	105.059.251	394.939.473	394.939.500
279	CIMAHI	KANANGA	289.880.221	87.385.142	377.265.363	377.265.400
280	CIMAHI	CIKEUSAL	289.880.221	95.833.378	385.713.600	385.713.600
281	CIMAHI	MEKARJAYA	289.880.221	92.935.506	382.815.727	382.815.700
282	CIMAHI	SUKAJAYA	289.880.221	80.767.426	370.647.647	370.647.600
283	CIMAHI	MULYAJAYA	289.880.221	68.879.617	358.759.839	358.759.800
284	CIMAHI	CIMULYA	289.880.221	77.073.902	366.954.124	366.954.100
285	CILEBAK	LEGOKHERANG	289.880.221	109.104.749	398.984.971	398.985.000
286	CILEBAK	BUNGURBERES	289.880.221	88.908.298	378.788.520	378.788.500
287	CILEBAK	CILEBAK	289.880.221	82.045.384	371.925.605	371.925.600
288	CILEBAK	JALATRANG	289.880.221	90.398.090	380.278.311	380.278.300
289	CILEBAK	PATALA	289.880.221	93.174.472	383.054.693	383.054.700
290	CILEBAK	MANDAPAJAYA	289.880.221	126.412.729	416.292.950	416.293.000
291	CILEBAK	CILIMUSARI	289.880.221	71.647.724	361.527.946	361.527.900
292	HANTARA	CITAPEN	289.880.221	52.032.004	341.912.226	341.912.200
293	HANTARA	PASIRAGUNG	289.880.221	46.189.919	336.070.141	336.070.100
294	HANTARA	TUNDAGAN	289.880.221	97.171.183	387.051.404	387.051.400
295	HANTARA	BUNIGEULIS	289.880.221	90.371.807	380.252.028	380.252.000
296	HANTARA	HANTARA	289.880.221	68.751.513	358.631.734	358.631.700
297	HANTARA	PAKAPASAN GIRANG	289.880.221	63.201.240	353.081.462	353.081.500
298	HANTARA	CIKONDANG	289.880.221	50.283.779	340.164.000	340.164.000
299	HANTARA	PAKAPASAN HILIR	289.880.221	52.547.174	342.427.396	342.427.400
300	KALIMANGGIS	KALIMANGGIS KULON	289.880.221	115.155.808	405.036.030	405.036.000
301	KALIMANGGIS	PARTAWANGUNAN	289.880.221	52.729.421	342.609.643	342.609.600
302	KALIMANGGIS	CIPANCUR	289.880.221	96.741.796	386.622.018	386.622.000
303	KALIMANGGIS	KERTAWANA	289.880.221	110.666.793	400.547.014	400.547.000
304	KALIMANGGIS	WANASARAYA	289.880.221	81.888.264	371.768.486	371.768.500
305	KALIMANGGIS	KALIMANGGIS WETAN	289.880.221	108.080.825	397.961.047	397.961.000
306	CIBEUREUM	CIMARA	289.880.221	96.063.222	385.943.444	385.943.400
307	CIBEUREUM	SUMURWIRU	289.880.221	58.109.468	347.989.689	347.989.700
308	CIBEUREUM	CIBEUREUM	289.880.221	140.582.968	430.463.189	430.463.200
309	CIBEUREUM	TARIKOLOT	289.880.221	63.680.845	353.561.066	353.561.100

310	CIBEUREUM	RANDUSARI	289.880.221	79.714.887	369.595.109	369.595.100
311	CIBEUREUM	SUKADANA	289.880.221	63.711.196	353.591.417	353.591.400
312	CIBEUREUM	KAWUNGSARI	289.880.221	55.403.525	345.283.747	345.283.700
313	CIBEUREUM	SUKARAPIH	289.880.221	97.122.523	387.002.744	387.002.700
314	KARANGKANCANA	KARANGKANCANA	289.880.221	107.948.370	397.828.592	397.828.600
315	KARANGKANCANA	KADUAGUNG	289.880.221	78.511.422	368.391.644	368.391.600
316	KARANGKANCANA	SEGONG	289.880.221	87.598.745	377.478.966	377.479.000
317	KARANGKANCANA	TANJUNGKERTA	289.880.221	93.104.327	382.984.548	382.984.500
318	KARANGKANCANA	SUKASARI	289.880.221	71.779.161	361.659.383	361.659.400
319	KARANGKANCANA	MARGACINA	289.880.221	80.850.208	370.730.430	370.730.400
320	KARANGKANCANA	JABRANTI	289.880.221	102.172.601	392.052.822	392.052.800
321	KARANGKANCANA	SIMPAY JAYA	289.880.221	75.720.212	365.600.434	365.600.400
322	KARANGKANCANA	CIHANJARO	289.880.221	77.767.106	367.647.327	367.647.300
323	MALEBER	GARAHAJI	289.880.221	49.995.551	339.875.772	339.875.800
324	MALEBER	GALAHERANG	289.880.221	91.369.861	381.250.083	381.250.100
325	MALEBER	CIPAKEM	289.880.221	186.704.202	476.584.423	476.584.400
326	MALEBER	MALEBER	289.880.221	66.639.933	356.520.155	356.520.200
327	MALEBER	PARAKAN	289.880.221	68.027.181	357.907.403	357.907.400
328	MALEBER	KUTARAJA	289.880.221	67.539.225	357.419.446	357.419.400
329	MALEBER	CIPORANG	289.880.221	49.386.279	339.266.500	339.266.500
330	MALEBER	DUKUHTENGAH	289.880.221	48.046.944	337.927.166	337.927.200
331	MALEBER	KARANGTENGAH	289.880.221	41.755.358	331.635.579	331.635.600
332	MALEBER	MEKARSARI	289.880.221	131.345.569	421.225.790	421.225.800
333	MALEBER	PADAMULYA	289.880.221	92.632.100	382.512.321	382.512.300
334	MALEBER	CIKAHURIPAN	289.880.221	95.037.636	384.917.857	384.917.900
335	MALEBER	KUTAMANDARAKAN	289.880.221	46.212.154	336.092.375	336.092.400
336	MALEBER	MANDALAJAYA	289.880.221	52.099.884	341.980.106	341.980.100
337	MALEBER	GIRIWARINGIN	289.880.221	89.371.793	379.252.015	379.252.000
338	MALEBER	BUNIASIH	289.880.221	42.085.734	331.965.955	331.966.000
339	SINDANGAGUNG	SINDANGSARI	289.880.221	63.904.767	353.784.989	353.785.000
340	SINDANGAGUNG	KADUAGUNG	289.880.221	54.285.640	344.165.862	344.165.900
341	SINDANGAGUNG	KERTAUNGERAN	289.880.221	55.376.675	345.256.896	345.256.900
342	SINDANGAGUNG	SINDANGAGUNG	289.880.221	77.141.005	367.021.227	367.021.200
343	SINDANGAGUNG	BALONG	289.880.221	57.182.626	347.062.847	347.062.800
344	SINDANGAGUNG	KERTAYASA	289.880.221	57.800.505	347.680.726	347.680.700

345	SINDANGAGUNG	KERTAWANGUNAN	289.880.221	60.274.269	350.154.490	350.154.500
346	SINDANGAGUNG	BABAKANREUMA	289.880.221	75.341.392	365.221.614	365.221.600
347	SINDANGAGUNG	TIRTAWANGUNAN	289.880.221	42.831.596	332.711.817	332.711.800
348	SINDANGAGUNG	DUKUHLOR	289.880.221	52.430.164	342.310.385	342.310.400
349	SINDANGAGUNG	TARAJU	289.880.221	70.257.953	360.138.174	360.138.200
350	SINDANGAGUNG	MEKARUKTI	289.880.221	48.018.326	337.898.547	337.898.500
351	CIGANDAMEKAR	BUNIGEULIS	289.880.221	66.073.473	355.953.694	355.953.700
352	CIGANDAMEKAR	JAMBUGEULIS	289.880.221	62.911.114	352.791.335	352.791.300
353	CIGANDAMEKAR	KOREAK	289.880.221	61.970.602	351.850.823	351.850.800
354	CIGANDAMEKAR	KARANGMUNCANG	289.880.221	72.250.516	362.130.738	362.130.645
355	CIGANDAMEKAR	SANGKANURIP	289.880.221	78.003.205	367.883.426	367.883.400
356	CIGANDAMEKAR	PANAWUAN	289.880.221	52.497.187	342.377.408	342.377.400
357	CIGANDAMEKAR	TIMBANG	289.880.221	89.293.447	379.173.668	379.173.700
358	CIGANDAMEKAR	BABAKANJATI	289.880.221	48.041.510	337.921.732	337.921.700
359	CIGANDAMEKAR	INDAPATRA	289.880.221	46.782.645	336.662.867	336.662.900
360	CIGANDAMEKAR	CIBUNTU	289.880.221	60.889.015	350.769.237	350.769.200
361	CIGANDAMEKAR	SANGKANMULYA	289.880.221	59.907.226	349.787.447	349.787.400
JUMLAH			<b>104.646.759.956</b>	<b>26.161.689.989</b>	<b>130.808.449.945</b>	<b>130.808.449.945</b>





LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
 NOMOR : 61 Tahun 2018  
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2018  
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN,  
 PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI  
 DANA DESA TAHUN 2019

**REKAPITULASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2019**

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 TAHAP : .....

JUMLAH PENERIMAAN ADD : Rp .....

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	.....	(a+b+dst)
	a. ....	.....	
	b. ....	.....	
		.....	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	.....	(a+b+dst)
	a. ....	.....	
	b. ....	.....	
	dst	.....	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	.....	(a+b+dst)
	a. ....	.....	
	b. ....	.....	
	dst	.....	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	.....	(a+b+dst)
	a. ....	.....	
	b. ....	.....	
	dst	.....	
5	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	.....	(a+b+dst)
	a. ....	.....	
	Dst	.....	
6	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	.....	(a+b+dst)
	b. Pembentukan Dana Cadangan	.....	
	c. Penyertaan Modal	.....	
	JUMLAH PENGGUNAAN (1+2+3+4+5+6)	.....	
	SISA	.....	

.....2019  
 KEPALA DESA.....



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
 NOMOR : 61 Tahun 2018  
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2018  
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN,  
 PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI  
 DANA DESA TAHUN 2019

**REKAPITULASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2019**  
**TAHAP .....**

KECAMATAN .....

NO	DESA	JUMLAH ADD DITERIM A	REALISASI PENGGUNAAN ADD (Rp)							SISA (3-9)	CATATAN
			BIDANG PEMERINTAHAN	BIDANG PEMBANGUNAN	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BIDANG PENANGGULAN GAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	PENGELUAR- AN PEMBIAYAAN	TOTAL (4+5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH.....											

.....2019  
 CAMAT .....

